

BAB V

POLITIK KIAI DAN PENDIDIKAN PESANTREN

Dalam memberikan gambaran yang jelas tentang isi bab ini, maka pembahasan di bagi menjadi tiga sub bab. Pertama tentang bagaimana peran pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata berperan dalam politik.

Kedua, tentang motivasi dan orientasi pengasuh Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam politik. Sedangkan yang ketiga membahas tentang dampak dari peran pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam politik terhadap perkembangan pondok pesantren yang dipimpinnya.

A. Peran Politik Kiai Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.

Seorang ulama dituntut memiliki peran di segala bidang kehidupan. Di bidang agama, ulama bertugas menyampaikan *risālah*, penegak moral dan simbol agama. Di sisi lain ulama juga berperan dalam bidang kehidupan yang bersifat profan; ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini dikarenakan, studi tentang kiai tidak hanya dapat di lihat dari satu faktor saja (kiai sebagai pemuka/tokoh agama), melainkan kiai mempunyai banyak wajah (*multy faces*) yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandangan kiai dalam berpolitik. Di kalangan ulama sunni dan begitu juga kebanyakan kiai di Indonesia melihat hubungan keduanya tidak terpisahkan.

Digelarnya model pemilihan kepala daerah secara langsung membawa dampak yang cukup serius terhadap perilaku politik di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain yang cukup luas untuk menyalurkan bakat-bakat politik mereka secara bebas. Tentu saja

banyak dari kelompok masyarakat yang belum siap dengan perubahan mendadak ini. Tampilnya para kandidat calon kepala daerah dalam arena Pilkada langsung harus menyeret dukungan dari berbagai kekuatan yang memiliki basis massa yang kuat. Organisasi sosial keagamaan adalah lahan potensial yang menjadi lahan rebutan para kandidat Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau Gubernur).

Keterlibatan para kiai dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan masing-masing.

Keterlibatan pesantren dalam politik mengambil bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan peran yang dimainkan oleh kiai, ustad, *nyai*, atau santri. Kita dapat membuat beberapa model keterlibatan pesantren dalam politik dengan mengamati berbagai proses keterlibatan politik pesantren yang terjadi selama ini.

Pertama, terlibat secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai politik tertentu. Hal itu secara langsung melibatkan elite pesantren, yakni kiai dan keluarganya atau ustad senior yang memiliki hubungan dengan kiai. Keterlibatan secara langsung memberikan peluang politik yang lebih besar bagi elite pesantren untuk mencapai jabatan politik yang lebih baik. Posisi tersebut diharapkan

memberikan ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pesantren, karena jabatan-jabatan politik turut menentukan kebijakan dan program-program pembangunan. Kasus terjun langsung dalam politik itu diperlihatkan oleh beberapa pengasuh atau putra pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata mulai dari pengasuh pesantren ini didirikan sampai kepada keturunannya sekarang.

Peran para pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata menurut K.H.R. Moh. Hasan AH¹ dimulai pada zaman pendahulu pendiri pesantren tersebut yaitu K.H.R. Abdul Majid, dalam sejarahnya beliau sebagai anggota dewan dari partai AKUI (Aksi Kemenangan Umat Islam) sekitar pada tahun 1950-an, hasil aspirasinya yang bisa dilihat dan dirasakan sampai sekarang adalah jembatan yang menghubungkan antara Desa Blumbungan dan Desa Plakpak.

Karakter politik K.H.R. Abdul Majid adalah berani menyampaikan kebenaran yang diyakininya serta tidak takut dikritik oleh kawan maupun lawan politiknya. Seperti yang disampaikan oleh K.H.R. Moh. Hasan AH, dalam wawancara:

Sabben K.H. Abdul Majid nika eteggor sareng kiaye-kiyae gara-gara pak Karno rabu ka Mekkasan. (dulu K.H. Abdul Majid pernah di teggor oleh para kiai disebabkan Presiden Soekarno datang ke Pamekasan), K.H. Abdul Majid menyerahkan himbauan atau tausiyah dalam bentuk tulisan kepada Presiden Soekarno, semua kiai menyalahkan K.H. Abdul Majid pada waktu itu, karena mereka khawatir Presiden Soekarno marah dengan adanya aspirasi tersebut, tetapi K.H. Abdul Majid tetap menyampaikan aspirasinya dalam bentuk tausiyah yang disampaikan di atas panggung. Setelah turun dari panggung, beliau berkata, "alhadulillah deri sampeyan kabbi se bedhe neng ka'enje gule bisa maste'agi je' gule la lebber ka pangeran, delem artian gule mareh ma'enga' torok tak etorok gule ta'

¹ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

andi' tanggungan” (alhamdulillah dari kalian semua yang ada disini, saya bisa memastikan bahwa saya sudah purna tanggung jawab kepada Allah SWT”. Maksudnya bahwa saya sudah mengingatkan kepada presiden Soekarno, diikuti atau tidak saya sudah tidak memiliki tanggung jawab.²

Kesetiaan K.H. Abdul Majid terhadap partai tidak diragukan lagi, hal ini terbukti dengan aktifnya beliau dalam partai dan menjadi juru kampanye bagi partai. Sampai sekarang bukti kesetiaan beliau terhadap partai masih ada. Seperti yang disampaikan oleh K.H. Moh. Hasan AH, dalam wawancara:

Sampai sekarang masih ada ukiran-ukiran AKUI di musholla, K.H. Abdul Majid sampai berpesan kepada keturunannya, “apapun yang terjadi jangan sampai gambar AKUI hilang”, padahal AKUI sudah tidak ada, AKUI sudah berfusi dengan PPP.³

Kesetiaan kepada partai bukan hanya dilakukan K.H. Abdul Majid, tetapi juga oleh penerusnya yaitu K.H.R. Ahmad Mahfud, seperti yang dituturkan oleh K.H. Moh. Hasan AH, dalam wawancara:

K.H.R. Ahmad Mahfud pernah mengatakan bahwa beliau tetap di PPP, beliau mengatakan “*sakeranah sengko' edelem kobur gi' bisa ajunjung tanang, sengkok ajunjunga tanang untuk PPP*” (seandainya saya di dalam kubur masih bisa mengacungkan tangan, maka saya akan mengacungkan tangan untuk PPP).⁴

Namun, menurut K.H.R. Moh. Hasan PPP khususnya di kabupaten Pamekasan sekarang sudah terjadi pergeseran nilai, hal ini terjadi karena pengurus PPP tidak seperti zaman pendahulu pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Oleh karena itu, pembelaan para pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sekarang juga tidak sama seperti dulu.

Pada saat ini para pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata mengutamakan penyelamatan akhlak dan aqidah masyarakat. Pada akhir-

²Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

akhir ini ada sebagian masyarakat yang meminta agar dari keluarga besar Mambaul Ulum Bata-Bata menjadi anggota dewan, akan tetapi mereka menolaknya, dengan alasan khawatir terjebak dalam pragmatisme dan oportunistik yang berlebihan. Oleh sebab itu, mereka lebih menekankan kader-kadernya yang bisa dipercaya dan mampu mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

Prinsip dari para pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata adalah memperjuangkan agama Islam dan untuk memperjuangkan semua hal pada zaman sekarang sangat sulit kalau tidak melalui sebuah sistem. Misalnya untuk merubah sebuah aturan atau mempertahankan aturan harus melalui DPR dan hal itu adalah proses dari sebuah sistem.⁵ Lebih lanjut K.H.R. Moh. Hasan mengatakan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

Salah satu contoh pemilihan Bupati yang akan datang, kalau kita bertanya kepada ulama, maka mereka akan menjawab “kita harus menyelaraskan sistem dengan perjuangan kita”, tetapi coba tanyakan kepada masyarakat di pedesaan, mereka pasti akan menjawab “ah itu hanya urusan bupati, hanya urusan uang”. Kalau kita mengikuti cara berfikir masyarakat semacam itu, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah melakukan hal yang bermanfaat untuk bangsa ini.⁶

Model keterlibatan politik kiai yang kedua adalah sebagai legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik pada partai atau tokoh politik tertentu yang berasal atau tidak berasal dari lingkungan pesantren. Hal seperti itu bagi banyak praktisi politik dianggap penting, sebab dalam sistem politik Indonesia yang ideologis dan tradisional, legitimasi keagamaan sangat dibutuhkan. Dan citra sebagai seorang Muslim yang baik, saleh, serta dekat dengan ulama turut menentukan elektabilitas seorang

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

praktisi politik di hadapan pemilih Muslim. Berkaitan dengan itu, pesantren sering menerima “order” kunjungan politisi, calon anggota legislatif, Capres, atau komunitas partai politik tertentu yang sedang berkompetisi. Hal itu dilakukan sebagai proyek pemoleasaan citra diri sebagai seorang Muslim yang baik yang dekat dengan komunitas agama atau pesantren. Hal ini bisa di lihat ketika para calon datang ke pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata untuk meminta restu politik kepada K.H. Hamid.

Peran K.H.R. Abd Hamid Mahfudz Zayyadi tidak hanya berhenti dalam tataran keagamaan saja, beliau juga aktif di wilayah-wilayah yang bersifat profan, baik pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Beliau adalah satu dari banyak kiai yang telah mendapatkan legitimasi dari umat. Disamping keturunan kiai, konstruk keilmuannya di bangun berdasarkan tradisi pesantren dan konstruk keilmuan negara Timur Tengah. Beliau adalah pengasuh utama pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, alumni pondok ini sudah banyak dan tersebar di seluruh Nusantara, sebagian dari alumni ada yang sudah mendirikan pondok pesantren.

K.H.R. Abd Hamid Mahfudz Zayyadi memerankan peran ganda dalam kehidupannya, di satu sisi beliau berperan di bidang agama yang bertugas menyampaikan *risālah*, penegak moral dan simbol agama melalui wadah pesantren yang dibinanya sampai sekarang dan memberikan pengajian di desa-desa. Namun, karena kondisi kesehatannya dalam empat tahun terakhir terganggu, maka masyarakat lebih inten mengundang putra-putra

beliau dalam memberikan ceramah agama.⁷ Seperti yang disampaikan oleh Imam Bahrurrosi kepada peneliti:

*Kiyae semangken ta' henga' dimen, manabi bede weli santré se acabis de' kiyae, kiyae coma atanya sareng ajeweb sakadere. Kiyae semangken manabi abudebu ta' samporna henga' dimen amarghe kiyae semangken songkan. Se kaule kaonengi kiyae semangken manabi abu-debu ta' abit ka tamui. Semangken se lebbi benyya' nemmuni tamui Lora Hasan.*⁸

(Kiai sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, kalau ada wali santri yang mau bertemu (*sowan*) kepada kiai, kiai cuma bertanya dan menjawab sekadarnya. Kiai sekarang kalau berbicara sudah tidak sempurna seperti dulu, karena kiai sekarang sedang sakit. Yang saya tahu kiai sekarang tidak bisa berbicara lama dengan tamu. Sekarang yang lebih banyak menemui tamu adalah *Lora Hasan*).

K.H.R. Abdul Hamid Mahfudz Zayyadi atau lebih dikenal dengan sebutan K.H. Hamid semenjak menggantikan tongkat estafet kepemimpinan, mengatakan bahwa “*dimana ada orang Islam, maka di sana ada saudara saya, jika ada orang yang berfikir untuk memajukan Islam maka dia adalah teman saya*”, K.H. Hamid tidak pernah berfikir lebih jauh ke ranah politik. Pada tahun 2003 K.H. Hamid diprovokator oleh seseorang sehingga beliau aktif dan sangat inten di politik. Namun, beliau akhirnya menyadari bahwa politik itu bukanlah tempat yang cocok baginya. Dalam arti, kalau terlampaui aktif dan keluar dari konsep sebagai pengayom dan pemerhati masyarakat, hal ini dirasakan sudah bukan tempatnya lagi.

Sehingga, K.H. Hamid mengurangi peran dalam dunia politik praktis, tetapi bukan tidak memperhatikan persoalan politik. Pada saat ini K.H. Hamid hanya memberikan legitimasi politik yang dimanifestasikan dalam bentuk restu politik pada partai atau tokoh politik tertentu yang berasal dari lingkungan maupun luar pesantren. Beliau merestui orang yang berkeinginan

⁷ Imam Bahrurrosi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

⁸ *Ibid.*

menjadi anggota dewan maupun sebagai bupati. K.H. Hamid juga merestui santrinya yang berkeinginan menjadi anggota dewan atau bupati. Disamping itu, beliau memberikan saran dan mengingatkan mereka agar tidak salah melangkah dalam mengarungi dunia politik.⁹

K.H. Hamid dan pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang lain hanya menjadi pendukung atau partisipan PPP. Walaupun demikian, pengaruhnya terhadap perolehan suara partai sangat menentukan, karena pengaruh yang dimiliki para pengasuh pesantren ini sangat besar dan luas terhadap masyarakat Pamekasan. Sedangkan latar belakang kiai Pamekasan terlibat dalam kehidupan politik lebih bersifat historis/ geneologis intelektual dan kultural.

Secara historis-geneologis keterlibatan mereka dalam dunia politik berkiblat kepada para pendahulu mereka dalam visi dan misi politiknya. Di samping itu, para kiai yang terlibat dalam dunia politik merasa berkewajiban untuk meneruskan langkah dan sepak terjang para pendahulunya yang diyakini sebagai suatu bentuk pengabdian kepada para pendahulu mereka (ayah dan kakek) dan guru mereka. Seperti yang disampaikan oleh K.H. Moh. Hasan kepada peneliti sebagai berikut:

Keluarga kami secara turun-menurun bersama PPP, alasannya adalah kami mengikuti sesepuh juga PPP adalah partai Islam. PPP bagi kami adalah tempat untuk berdakwah. Sampai saat ini, PPP masih relevan dan mempertegas ukhuwah Islamiyah. Tetapi kami tidak di struktural partai. Kami sempat tidak aktif selama satu periode, karena pimpinan PPP pada waktu itu tidak sesuai dengan harapan kami (aspirasi kami tidak serasi), dan status kami bisa dikatakan sebagai tokoh kultural.¹⁰

⁹ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

¹⁰ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 4 September 2012.

Pernyataan seperti di atas juga diungkapkan oleh Ach. Ruslan Dimiyathi, selaku kepala Madrasah Tsanawiyah di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sekaligus menjadi ketua Ikatan Alumni Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Namun, dari pernyataan Ruslan terdapat perbedaan tentang pengasuh sebagai pengurus partai politik. Menurut Ruslan salah satu putra K.H. Hamid yaitu K.H. Moh. Hasan sampai saat ini masih sebagai pengurus PPP. Seperti yang ia sampaikan dalam wawancara:

Secara struktural beliau tidak masuk dalam struktur kepengurusan PPP, tetapi beliau hanya aktif dalam kegiatan-kegiatan kampanye saja, setelah selesai kampanye beliau hanya menjadi figur yang di tokohkan partai tersebut. Sedangkan putra-putra beliau sampai sekarang masih komitmen dengan PPP, secara struktural *Lora* Hasan sebetulnya dari dulu sampai sekarang sebagai ketua atau pimpinan Gerakan Pemuda Ka'bah. Dengan suasana politik sekarang, memang ada sedikit pergeseran, karena masyarakat lebih mementingkan figur dari pada partai politiknya, selama ini beliau mendukung figurnya, tidak mementingkan partainya.¹¹

Dari gambaran di atas dapat ditemukan bahwa K.H. Hamid dari awal tidak terlibat secara langsung sebagai aktor politik dan pengurus partai politik tertentu. Tetapi putra beliau yaitu K.H. Moh. Hasan terlibat secara langsung sebagai ketua Gerakan Pemuda Ka'bah.

Keterlibatan secara langsung memberikan peluang politik yang lebih besar kepada K.H. Moh. Hasan untuk mencapai jabatan politik yang lebih baik. Posisi ini diharapkan memberikan ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pesantren. Karena jabatan-jabatan politik turut menentukan kebijakan dan program-program pembangunan.

Disamping melegitimasi politik dalam bentuk restu politik K.H. Hamid juga sebagai kekuatan pendukung calon tertentu dengan cara

¹¹ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 4 September 2012.

memberikan dukungan dalam bentuk mengkampanyekan calon yang didukungnya untuk mensosialisasikan visi politik calon tersebut. Hal semacam ini dilakukan oleh K.H. Hamid pada waktu mengkampanyekan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan pada tahun 2008, seperti yang dituturkan oleh Ruslan:

K.H. Hamid aktif di salah satu partai, tetapi beliau tidak berada di struktural. Beliau terlibat langsung dalam kampanye-kampanye politik di saat ada jadwal kampanye, selebihnya beliau tetap fokus mengajar di pesantren juga melayani tamu-tamu yang datang ke pesantren terkait permasalahan kepesantrenan maupun sosial.¹²

Ruslan melanjutkan bahwa K.H. Hamid berkampanye karena beliau menjadi jurkam dari salah satu calon pasangan bupati dan wakil bupati Pamekasan pada tahun 2008. Walaupun K.H. Hamid tidak berada di struktural PPP, namun beliau menjadi figur sentral di PPP pada waktu itu, sehingga apapun yang menjadi persoalan pada akhirnya meminta fatwa kepada beliau, dan yang paling didengar pada waktu itu adalah fatwa K.H. Hamid dan K.H. Syamsul Arifin pengasuh pesantren Miftahul Ulum Banyuwangi.

Jadi, apapun yang dikatakan atau difatwakan oleh dua kiai tersebut akan menjadi pedoman tersendiri bagi masyarakat, sehingga kalau terjadi tarik-menarik persoalan apapun, penyelesaiannya berada pada dua kiai tersebut.¹³

Pilkada Pamekasan pada tahun 2008 adalah awal dari K.H. Hamid tidak mendukung calon bupati yang diusung oleh PPP. Hal ini terjadi karena aspirasi dan pilihan politik beliau tidak sejalan dengan aspirasi dan pilihan politik pengurus PPP, sehingga aspirasi dan pilihan politik K.H. Hamid

¹² Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

¹³ Ach. Ruslan Dimiyathi S.Pd.I, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

diaktualisasikan mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang di calonkan oleh PBB dan GOLKAR. Sehingga, isu yang berkembang di masyarakat adalah berpindahnya K.H. Hamid dari PPP ke PBB.

Namun isu tersebut disanggah oleh Ruslan, menurutnya K.H. Hamid tidak keluar sebagai partisipan PPP. K.H. Hamid sering mengatakan bahwa dirinya tetap sebagai partisipan PPP. Perbedaan pandangan antara K.H. Hamid dengan pengurus PPP pada waktu itu terkait permasalahan pemilihan bupati, pimpinan PPP dirasa kurang aspiratif terhadap suara-suara ulama. Hal tersebut bukan hanya menyangkut K.H. Hamid saja, tetapi banyak dari kiai partisipan PPP menyatakan tetap eksis di PPP, namun ketika pemilihan bupati berlangsung, banyak dari kiai tersebut menggunakan partai lain. Alasan lainnya adalah karena pada waktu itu masyarakat lebih melihat seorang figur dari pada partai politik.¹⁴

B. Motivasi dan Orientasi Peran Politik Kiai pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.

Proses-proses politik yang terjadi di pesantren menunjukkan bahwa keterlibatan pesantren dalam politik didorong oleh motif politik yang beragam. Motif yang dimaksud di sini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam pesantren, baik yang disadari maupun tidak disadari untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu untuk menjelaskan motif keterlibatan pesantren dalam politik juga bukan sesuatu yang mudah. Di sini kita memasuki ranah perdebatan yang sensitif yakni berusaha menjelaskan berbagai alasan yang mendorong pesantren terlibat dalam politik. Satu hal yang sering kali tidak mau

¹⁴ Ibid.,

diakui oleh komunitas pesantren. Dibutuhkan suatu analisis yang lebih dalam dan cermat, karena keterlibatan pesantren dalam politik dipengaruhi berbagai faktor yang saling terkait, baik yang berasal dari kondisi-kondisi internal pesantren maupun tekanan eksternal.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara maupun observasi di Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, maka setidaknya terdapat beberapa motif dan orientasi atau alasan mengapa pesantren terlibat dalam politik.

1. Teologis

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengkaji dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, maka basis argumentasi politik pesantren jelas bersandar pada pemahaman keagamaan yang kuat. Pemahaman tersebut disarikan dari penjelasan al-Qur'an dan Sunnah serta paparan ulama-ulama terdahulu yang dijelaskan dalam berbagai kitab klasik (kitab kuning) yang sering dikaji di pesantren. Umumnya komunitas pesantren memandang bahwa politik merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Bernegara mempunyai koherensi dengan beragama yang direfleksikan dari pemikiran bahwa pendirian negara sesuai dengan *Ijma'* ulama adalah hukumnya *farḍu kifāyah*. Pandangan ini sejalan dengan kaidah *Fiqh* yang menyatakan *mallā yatimmuh al-wajib illā bihī, fahuwā wājib* (jika sesuatu kewajiban tidak dapat sempurna kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarana itu hukumnya wajib). Dalam logika ini bila menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut (salah satunya) adalah negara, maka hukum mendirikan negara juga

wajib (*farḍu kifāyah*). Dalam teori politik Islam, pemahaman seperti ini lebih dikenal dengan paham akomodasionis yang memandang politik sebagai bagian dari ajaran agama yang tidak dapat dilepaspisahkan.¹⁵

Konsekuensi dari berbagai pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa mengelola negara dengan sebaik-baiknya sama hukumnya dengan mendirikan negara. Karena itu, ketika negara telah didirikan tetapi hanya menimbulkan *muḍarat*, justru akan bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya negara dalam Islam yakni membentuk masyarakat sejahtera di bawah ampunan Allah SWT.

Sama seperti mendirikan negara, menegakkan suatu kepemimpinan (*Kholīfah*, *Imāmah*, maupun Presiden) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga merupakan suatu keniscayaan (kewajiban). Pemimpin merupakan syarat bagi terciptanya suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh sebab itu, seperti yang dituturkan oleh K.H. Moh. Hasan bahwa motivasi K.H. Hamid berperan dalam politik adalah untuk memilih pemimpin, karena salah satu proses berpolitik adalah memilih pemimpin, dan memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut K.H. Moh. Hasan pemimpin dalam agama Islam adalah sebuah keniscayaan. Setiap umat muslim memiliki tanggung jawab dalam memilih pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana. Bagi K.H. Moh. Hasan

¹⁵ Dien Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 2, Vol. IV, 1993.

tugas dalam dunia politik adalah menghilangkan kewajiban untuk memilih pemimpin, sedangkan tugas utamanya adalah membina pondok pesantren.¹⁶

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan bagi setiap orang, sebab pemimpin itulah yang akan membawa maju-mundurnya suatu organisasi, lembaga, negara dan bangsa. Oleh karenanya, pemimpin mutlak dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat.

Menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan pemimpin sangat penting, antara lain karena pemimpin mempunyai dua tujuan sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama dan untuk memimpin atau mengatur urusan dunia. Dengan kata lain, bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan *amar ma'ruf nahī munkar*, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat.

Dari sinilah para ulama berpandangan bahwa menegakkan suatu kepemimpinan (*imāmah*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan (kewajiban). Sebab *imāmah* merupakan syarat bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan serta terhindar dari kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tampilnya seorang pemimpin yang ideal yang menjadi harapan komponen masyarakat menjadi sangat urgen.

¹⁶ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

2. Idiologis

Berbagai macam motivasi dan orientasi para kiai terjun ke dunia politik yang mereka yakini sebagai kebenaran dan ijtihad untuk memperbaiki bangsa dari dekadensi moral, keterpurukan ekonomi, budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama serta para pemimpin yang bermental korup dari tingkat lokal sampai nasional.

Orientasi ideologis adalah terjunnya kiai ke gelanggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, masuknya kiai ke ranah politik sebagai bagian *amar ma'ruf nahī munkar*. Orientasi inilah yang paling menonjol dalam setiap aktifitas kiai dalam ranah politik.

Seperti yang dituturkan oleh para santri Mambaul Ulum Bata-Bata, walaupun mayoritas santri tidak mengetahui apa yang menjadi motivasi kiainya terlibat dalam politik, tetapi banyak dari santri meyakini bahwa yang dilakukan oleh kiainya adalah untuk menegakkan syari'at Islam sehingga masyarakat bisa merasakan keadilan, seperti pernyataan Moh. Ali Qowi sebagai berikut:

Alasan kenapa kiai atau pengasuh berperan dalam politik atau mendukung kemenangan salah satu Calon Bupati, saya pribadi kurang tahu, karena kiai tidak mengatakan alasannya kepada kami, tapi saya yakin beliau bertindak seperti itu untuk menegakkan syari'at Islam di Pamekasan.¹⁷

Sementara itu, santri banyak mengetahui alasan keterlibatan K.H. Hamid dalam politik dari fatwa yang disampaikannya pada waktu

¹⁷ Moh. Ali Qowi, *Wawancara*, Pamekasan, 4 September 2012.

menganjurkan kepada mereka untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan yaitu K.H. Kholilurrahman dan Kadarisman Sastro Diwirjdo (KONDANG) pada Pilkada Pamekasan tahun 2008. Seperti yang disampaikan oleh Moh. Afifurrahman sebagai berikut:

Kaule ta' oneng ponapa alasanna kiyae apolitik, tape se kaule kaonengi kiyae adebu "bentoh sengko' edelem peliyen bupati 2008 demi tegaknya syari'at Islam emekkasana."¹⁸

Saya tidak tahu apa alasan kiai berpolitik, akan tetapi yang saya ketahui adalah kiai mengatakan " bantu saya di dalam pemilihan bupati 2008 demi tegaknya syari'at Islam di Pamekasan.

Ketertarikan umat Islam kepada partai politik salah satunya disebabkan oleh kemampuan partai politik memperjuangkan dan membela kepentingan agama Islam, hal ini senada dengan motivasi K.H. Hamid dalam menegakkan nilai-nilai syari'at agama Islam dalam berpolitik. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ruslan sebagai berikut:

Saya sering mendampingi K.H. Hamid dalam hal-hal tertentu. Ketika ada tamu dari calon bupati atau DPR dan tamu yang meminta tausiyah politik, beliau tidak lupa menitipkan satu pesan yaitu "Islam". Beliau memiliki prinsip apapun yang berkaitan dengan Islam perlu didukung, beliau juga memiliki motivasi bagaimana nilai-nilai Islami bisa dijalankan dari segala segi termasuk di pemerintahan.¹⁹

Prinsip politik K.H. Hamid adalah syari'at Islam berjalan sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan membawa dampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Seperti pernyataan K.H. Abd Qodir sebagai berikut:

Yang saya ketahui tentang latar belakang berperannya kiai adalah politik yang dijalankan oleh beliau berdampak positif terhadap agama Islam, sehingga berdampak pula terhadap kesejahteraan masyarakat.²⁰

¹⁸ Moh. Afifurrahman, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

¹⁹ Ach. Ruslan Dimyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

²⁰ Abd Qodir, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

Disamping motivasi K.H. Hamid berperan dalam politik adalah menegakkan nilai-nilai Islam dari segala lini kehidupan, beliau juga memiliki orientasi ideologis yang lain, yaitu terjalannya kerukunan dan persatuan antara umat, ulama dan umara sehingga keamanan, ketentraman, keadilan dan kemakmuran akan tercipta di Pamekasan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebagaimana pernyataan Moh. Husen:

Saya kurang tahu masalah kiai berperan serta dalam politik, saya mengetahui bahwa beliau hanya mendukung salah satu pasangan bupati, dan dukungan beliau terhadap mereka tidak mengikat. Alasan kiai berpolitik adalah untuk persatuan umat, ulama dan umara di Pamekasan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.²¹

Sedangkan menurut Imam Bahrurrasi, berperannya K.H. Hamid dalam politik praktis secara non formal. Sementara itu pernyataan K.H. Hamid tentang latar belakang dirinya berperan dalam politik seperti yang sering disampaikan kepada para santrinya adalah bahwa nabi Muhammad bukanlah hanya nabi akan tetapi juga politisi yang ulung.

Untuk itu dalam politik kita juga memiliki tanggung jawab dalam memilih pemimpin yang baik, adil dan bijaksana, serta tanggung jawab sebagai kontrol sosial kepada pemerintah.²²

3. Solutif

Kiai sebagai tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Disamping itu kiai menjadi patron kepada siapa masyarakat merujuk dan bergantung.

Pengakuan masyarakat bahwa kiai pewaris para nabi memberikan legitimasi bahwa kiai adalah sosok yang paling menentukan dalam

²¹ Moh. Husen, *Wawancara*, Pamekasan, 4 September 2012.

²² Imam Bahrurrasi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi umat. Dengan demikian, keanekaragaman persoalan yang selalu memerlukan solusi dari kiai, khususnya masalah-masalah politik, kekuasaan dan kenegaraan, menjadikan kiai dan pesantren tidak hanya berperan dalam memberikan persoalan keagamaan, tapi juga terlibat dalam persoalan politik.

Hal inilah yang juga memotivasi K.H. Hamid berkiprah dalam politik sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Masykur bahwa sebagian besar masyarakat Madura adalah santri, dan kebiasaan santri dalam meminta solusi atas segala keluhan dan permasalahan yang dihadapi baik persoalan pribadi maupun kelompok mengadu kepada kiai bukan kepada kepala desa, sehingga mengharuskan pengasuh pesantren melayani, menjawab dan mencari solusi atas segala persoalan masyarakat.²³

C. Dampak Peran Politik Kiai Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata terhadap perkembangan Pondok Pesantren yang dipimpinnya.

Pro-kontra yang mengiringi keterlibatan sebagian pesantren dalam politik praktis pada dasarnya merupakan wujud ekspektasi umat terhadap posisi pesantren yang terhormat. Sejak lama umat Islam di Indonesia menempatkan pesantren sebagai sumber rujukan moralitas keagamaan. Para kiai adalah panutan umat yang fatwa serta nasihatnya menjadi pegangan masyarakat. Bahkan menurut Zamakhsyari Dhofier, sebagaimana dikutip Khoirudin,²⁴ peran kiai merupakan faktor determinan kebijakan sosial dan pengambilan keputusan-keputusan penting menyangkut keberhasilan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pesantren merupakan pilar

²³ Ahmad Masykur, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

²⁴ Khoirudin, *Politik Kiai*, 144.

bagaimana nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai keagamaan dijalankan di tengah masyarakat.

Persoalan mengemuka ketika pesantren yang merupakan referensi nilai-nilai keagamaan itu tertarik ke dalam dunia politik praktis dengan berbagai alasan yang diyakininya. Di sinilah sebagian orang menilainya sebagai bentuk penyimpangan terhadap peran sosial yang selama ini dijalankan pesantren. Apalagi keterlibatan pesantren dalam politik sering disertai aktivitas-aktivitas partisan sesuai tuntutan kepentingan politik yang terkadang tidak sejalan dengan logika masyarakat umum. Di sini kiai dan pesantren tidak dapat memertahankan legitimasi keagamaannya karena masyarakat telah meragukan otoritas dan ketulusan yang dimiliki, yakni apakah pesantren sedang berbicara atas dasar kepentingan agama dan kepentingan umat atau atas dasar kepentingan partai politik atau politisi yang didukung pesantren.

Berbagai fenomena politik yang berkaitan dengan dukung-mendukung politik di dunia pesantren menunjukkan bahwa aktivitas politik pesantren ternyata memiliki dampak sangat luas. Analisis terhadap hal ini bisa dimulai dari perdebatan doktrinal keagamaan tentangan hubungan agama dan negara di Indonesia, hingga dampak-dampak material yang mungkin diperoleh oleh pesantren. Dengan demikian pesantren terlibat politik bukanlah sebuah frasa sederhana, tetapi memiliki implikasi yang luas yang mesti dianalisis secara hati-hati.

Adapun dampak peran politik pengasuh pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata terhadap perkembangan pondok pesantren yang dipimpinnya adalah sebagai berikut:

1. Demokratisasi Pesantren

Pemilihan umum pada tahun 2004 merupakan awal sejarah baru proses demokratisasi di Indonesia. Pesta demokrasi baik pemilu legislatif maupun eksekutif yang lalu memberikan kesempatan yang sangat besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini tidak terkecuali pesantren yang menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang didirikan para ulama masa dulu.

Karakteristik pesantren yang tidak bisa lepas dari eksistensi seorang kiai sebagai pemimpin dengan segala karismanya memiliki pengaruh yang sangat kuat baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini menandakan bahwa peran pesantren bukan hanya menyangkut lembaga pendidikan di dalamnya tetapi juga permasalahan yang sering terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal memiliki modal yang sangat kuat untuk membina dan mengarahkan masyarakat atau santri dalam upaya meningkatkan pendidikan politik, mengingat pesantren merupakan dari sarana sosialisasi nilai-nilai politik.

Pada Pilkada Kabupaten Pamekasan tahun 2008, K.H. Hamid mendukung salah satu calon pasangan bupati dan wakil bupati yaitu

Kholilurrahman dan Kadarisman Sastrodiwirjo (KONDANG), sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Moh. Hasan AH sebagai berikut:

Pada Pilkada/Pilbup kabupaten Pamekasan tahun 2008 Kami ikut Andil bukan sebagai tim sukses pemenangan pasangan KONDANG (Kholilurrahman dan Kadarisman Sastrodiwirjo) melainkan hanya sebagai pendukung. kami menerima kalau kami dikatakan sebagai motor pendorong masyarakat untuk mendukung pasangan tersebut.²⁵

Walaupun hanya sebagai pendukung, namun pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata adalah motor pendorong dan penggerak massa untuk pasangan KONDANG. Hal ini terbukti dalam proses pemilihan Bupati di Pamekasan tahun 2008, pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan KH. Hamid menjadi salah satu pendongkrak suara bagi pasangan KONDANG, sehingga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut keluar sebagai pemenang.

KH. Hamid dalam kesempatan tersebut mengarahkan atau menganjurkan para santrinya untuk memilih salah satu calon pasangan bupati. Anjuran atau arahan tersebut dilakukan oleh KH. Hamid karena beliau yakin bahwa calon bupati yang didukungnya adalah calon bupati yang paling baik untuk masa depan Kabupaten Pamekasan. Seperti hasil wawancara peneliti kepada K.H. Moh. Hasan AH:

Pada Pilkada/Pilbup Pamekasan tahun 2008 kami sempat menganjurkan para santri dan alumni untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu KH. Kholilurrahman dan Kadarisman Sastrodiwiryo (KONDANG), karena kami yakin pasangan tersebut baik untuk Pamekasan kedepan.²⁶

Fatwa K.H. Hamid kepada para santri dan alumni untuk memilih pasangan KONDANG sifatnya adalah anjuran, sebab kalau pernyataan

²⁵ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

²⁶ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

K.H. Hamid sifatnya perintah, maka hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Seperti yang diungkapkan oleh K.H. Abd. Qadir, dalam wawancara;

KH. Hamid mengatakan kepada santri untuk memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati sifatnya adalah anjuran bukan perintah, kalau sifatnya perintah itu melanggar hak asasi.²⁷

Arahan atau anjuran untuk memilih salah satu calon bupati yang dilakukan oleh KH. Hamid menurut sebagian para santri dan alumni disampaikan bukan di lingkungan pondok pesantren, tetapi dilakukan di luar lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren K.H. Hamid tidak pernah membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan politik praktis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ach. Ruslan Dimiyathi:

Selama ini kiai tidak pernah berbicara tentang politik di lingkungan pesantren. Jadi di pondok pesantren baik pada waktu ngaji, ada tamu negara atau acara wisuda santri, beliau tidak pernah menyentuh persoalan politik, pembicaraan beliau lebih bersifat umum dan motivasi kepada santri serta bagaimana membangun pendidikan di pesantren lebih maju, tetapi dalam kegiatan kampanye dan karena kampanye lebih bersifat kepentingan, secara umum Jurkam pasti mengarahkan kepada salah satu calon yang di dukung dan hal itu sebuah kewajiban, semua Jurkam pasti seperti itu.²⁸

Walaupun arahan K.H. Hamid menurut penuturan para santri dan alumni lebih bersifat anjuran dan disampaikan di luar pesantren, tetapi bisa di lihat dari pernyataan Ruslan bahwa K.H. Hamid di luar lingkungan pesantren adalah sebagai Jurkam (juru kampanye) salah satu calon bupati. Kegiatan kampanye sifatnya adalah kepentingan untuk mengarahkan massa. Maka, menjadi hal yang wajar apabila Jurkam mengarahkan kepada salah satu calon bupati yang di dukungnya. Dengan demikian,

²⁷ Abdul Qadir, *Wawancara*, Pamekasan, 5 September 2012.

²⁸ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

arahan K.H. Hamid tersebut membawa dampak pada pemikiran dan keinginan santri dalam pilihan politik.

Kebiasaan secara umum, arahan maupun anjuran yang dilakukan oleh kiai dimanapun tempatnya, maka hal tersebut akan selalu diikuti dan dilaksanakan oleh santri. Bila dikaitkan dengan budaya *ta'zīm* kepada kiai/guru dikalangan santri atau masyarakat religius menjadikan setiap ucapan, perbuatan dan sikap kiai layak diikuti/ditiru. Dalam arti perintah seorang kiai seringkali tidak perlu disampaikan secara gamblang, akan tetapi cukup dengan simbol tertentu dan hal tersebut sudah masuk kategori perintah yang harus didengarkan dan ditaati atau dalam istilah agama dikenal dengan *sami'nā wa ato'nā* (kami mendengar dan kami mentaatinya). Hal ini terungkap dalam wawancara kami kepada santri dan alumni pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata:

Kalau secara langsung kiai tidak pernah memerintahkan kepada santri untuk memilih kiai Kholil, hanya beliau mengatakan “ bantu saya dalam pemilihan bupati demi tegaknya syari'at Islam di Pamekasan”. Beliau juga tidak menekan santri untuk memilih calon bupati yang di anjurkannya. Dalam memilih bupati saya mengikuti pengasuh, mengenai alasannya saya hanya membantu kiai dan saya hanya teringat kata-kata beliau yaitu: “bantu saya dalam pemilihan bupati 2008 demi tegaknya syari'at Islam di Pamekasan”.²⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Moh. Ali Qowi, tetapi ia merasa kebingungan atas fatwa K.H. Hamid, sebab ia tidak mengetahui apakah yang dikatakan oleh K.H. Hamid sifatnya perintah atau anjuran. Namun, pada akhirnya ia memilih salah satu calon pasangan bupati atas keyakinannya sendiri dan ditopang dengan anjuran dari kiainya (KH. Hamid). Seperti yang diungkapkan dalam wawancara:

²⁹ Moh. Afifurrahman, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

Saya tidak tahu apakah itu perintah atau anjuran, tapi yang pasti kiai pernah menganjurkan untuk memilih pasangan KONDANG (Kholilurrahman dan Kadarisman Sastrodiwirjo). Saya memilih bupati atas keyakinan saya sendiri serta anjuran dari kiai.³⁰

Walaupun menurut santri dan alumni pilihan politiknya dilandasi hati nuraninya dan K.H. Hamid tidak memberikan instruksi dan tidak pernah memaksa harus memilih salah satu pasangan calon bupati, namun apapun alasan para santri tersebut pada akhirnya mereka tetap memilih bupati sesuai dengan pilihan kiainya, karena mereka patuh terhadap kiainya dan karena kiai sejak awal selalu memberikan nasehat yang baik kepada mereka, sehingga dalam keadaan apapun kiai menjadi panutan bagi santri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ach. Masykur:

Kiai tidak memberikan instruksi harus memilih salah satu pasangan calon bupati. Kiai sejak awal memberikan nasehat yang baik kepada santri dan alumni, sehingga dalam keadaan apapun kiai menjadi panutan bagi santri, artinya dalam memilih bupati santri lebih mengikuti nuraninya bukan karena kiainya, bukan karena kiai menginstruksikan santri harus memilih calon tertentu. Sedangkan dalam memilih bupati kemaren, saya memilih atas keyakinan sendiri. Secara prinsip saya dan teman-teman tidak pernah berbeda dengan kiai. Jarang sekali santri berbeda dengan keinginan kiai. Alasan saya selalu sama dengan kiai, pilihan kiai lebih baik dari pilihan saya dengan beberapa alasan, pertama dari segi spiritual dan dari segi apapun kiai lebih baik dari saya, sehingga apa yang beliau pilih insyaallah lebih baik dari pilihan saya dan itu biasanya prinsip para santri, walaupun hal tersebut bukan mengkultuskan kiai.³¹

Ach. Ruslan juga mengatakan bahwa pilihan dirinya sama dengan pilihan kiai, ia memilih pemimpin dengan alasan seorang pemimpin harus memiliki kemampuan secara profesional sebagai seorang pemimpin. Ruslan mengatakan bahwa KH. Hamid dalam memilih pemimpin sangat hati-hati. Misalnya KH. Hamid memilih figur seorang pemimpin yang

³⁰ Moh. Ali Qowi, *Wawancara*, Pamekasan, 4 September 2012.

³¹ Ahmad Masykur, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

aspiratif terhadap keinginan umat Islam dan memperjuangkan Islam.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ach. Ruslan kepada peneliti:

K.H. Hamid dan putra-putranya sering berpesan bahwa kita tidak boleh fanatik terhadap apapun kecuali satu yaitu Islam. Beliau sangat berhati-hati dalam memilih pemimpin. Beliau melihat seorang figur pemimpin yang aspiratif terhadap keinginan umat Islam. Sejalan dengan apa yang ada di benak saya bahwa selama ini saya bukan mengikuti kiai dalam memilih pemimpin, tetapi beliau sangat selektif dalam memilih figur. Kalau ada seorang kandidat yang datang ke pondok pesantren, beliau hanya menitip satu yaitu Islam. Jadi kalau saya pribadi secara profesional harus memilih pemimpin yang betul-betul memiliki kemampuan menjadi pemimpin baik calon Presiden, Gubernur dan Bupati.³²

Arahan K.H. Hamid terlihat juga ketika terdapat sebagian santri yang berbeda pandangan pilihan politik dengan K.H. Hamid dalam menentukan pasangan calon bupati. Menurut K.H. Moh. Hasan, santri yang berbeda pandangan pilihan politik dengan para pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tersebut diajak untuk berdialog dan menyamakan persepsi, serta menganjurkan kepada mereka untuk memilih pasangan calon bupati yang diyakini baik menurutnya.

Anjuran K.H. Moh. Hasan dan para pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata lainnya tersebut tidak kemudian diikuti oleh semua santri yang pandangan politiknya berbeda dengan para pengasuh. Ada beberapa santri yang tetap teguh dengan pilihan politik mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H. Moh. Hasan, AH dalam wawancara kepada peneliti:

Dalam menentukan pasangan calon bupati ada beberapa santri yang berbeda dengan kami, akan tetapi kami mengajaknya untuk berdialog dan menyamakan persepsi serta kami menganjurkan kepada mereka untuk memilih pasangan calon bupati yang kami

³² Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

yakini baik. Tetapi anjuran kami tersebut tidak serta merta diikuti oleh semua santri yang pandangan politiknya berbeda dengan kami, ada beberapa santri yang tetap teguh dengan pilihan mereka.³³

Dari pernyataan K.H. Moh. Hasan tersebut kita dapat menggambarkan bahwa bahasa “dialog” yang dipakai oleh para pengasuh pesantren, terkesan mengarahkan santri untuk memilih salah satu calon pasangan bupati Pamekasan. Dapat digambarkan pula bahwa kata “anjuran” bagi santri dan alumni adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan, karena bagi santri prinsipnya adalah *sam‘ān waṭā‘atan* kepada guru/kiai.

Anjuran atau arahan ini terbukti sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh para santri ketika pelaksanaan pemilihan bupati dan pemilihan Gubernur, suara terbanyak atau bisa dikatakan semua suara pemilih di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang berada dikomplek pesantren dimenangkan oleh calon yang didukung oleh kiai, hal ini diungkapkan oleh Imam Bahrurrasi dalam wawancara:

yang kami ketahui belum ada santri aktif berbeda pilihan politiknya dengan kiai, terbukti ketika ada Pilbub atau Pilgub, perolehan suara di semua TPS yang ada di pesantren tertuju kepada calon bupati yang didukung oleh kiai. Itu berarti secara data membuktikan bahwa tidak ada santri yang pilihan politiknya berbeda dengan kiai.³⁴

Dalam menghadiri jadwal kegiatan kampanye, K.H. Hamid tidak pernah melibatkan para santrinya yang masih aktif di pesantren, beliau hanya melibatkan para alumni, sebagaimana yang disampaikan oleh K.H. Moh. Hasan:

³³ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

³⁴ Imam Bahrurrasi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

Kami tidak pernah mengajak santri kami dalam arena kampanye, tetapi kalau para alumni kami mengajaknya.³⁵

Demikian pula yang diungkapkan oleh Ruslan, dia mengatakan bahwa dirinya sering mendampingi putra-putra K.H. Hamid dalam melaksanakan aktivitas politiknya. Ia juga mengatakan bahwa K.H. Hamid tidak pernah melibatkan santri, dewan guru, para ustad dalam kegiatan politik kecuali yang sudah menjadi alumni.

K.H. Hamid bersikap profesionalisme ketika beliau mengikut sertakan alumni ketika berkampanye. Misalnya, beliau mendiskusikan dan mengevaluasi bersama para alumni terkait kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan, apakah kegiatan kampanye tersebut merugikan terhadap pesantren atau tidak. Apabila merugikan terhadap kegiatan pendidikan pesantren, maka K.H. Hamid mengurungkan niatnya untuk berkampanye.

K.H. Hamid tidak membawa semua alumni dalam kegiatan kampanye, hanya beberapa alumni saja yang mengikuti pelaksanaan kampanye tersebut. Para alumni pesantren yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan kampanye kadangkala datang atas keinginan sendiri tanpa ada perintah atau paksaan dari beliau. Misalnya yang dilakukan oleh Ahmad Masykur, ia menyatakan bahwa:

Kalau dalam kampanye saya tidak pernah di ajak, saya datang sendiri, Jadi kiai tidak pernah mengganggu aktivitas ksantrian, dan beliau tidak pernah membawa santri ke arena kampanye.³⁶

Yang menarik adalah pernyataan dari Moh. Afifurrahman. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengikuti dan tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh K.H.

³⁵ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

³⁶ Ahmad Masykur, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

Hamid, karena waktu itu sampai sekarang ia masih menjadi santri aktif, lebih lanjut ia mengatakan bahwa ada sekitar 30-40 santri yang statusnya sebagai keamanan pondok pada waktu itu yang dilibatkan oleh K.H. Hamid atau ikut berpartisipasi dalam kampanye. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dalam arena kampanye. Seperti pernyataan Afifurrahman dalam wawancara:

Kalau saya pribadi tidak ikut, karena saya pada waktu itu menjadi santri aktif sampai saat ini. Yang ikut atau yang di ajak oleh kiai adalah santri yang menjadi keamanan pondok sekitar 30-40 orang. Juga para alumni pondok. Sedangkan santri dan pengurus pondok tidak ikut atau tidak di ajak, mereka ada di pondok.³⁷

Pernyataan Moh. Afifurrahman ini sangat berbeda dengan pernyataan informan-informan sebelumnya yang mengatakan santri aktif tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye, tetapi ada beberapa santri yang jabatannya sebagai keamanan pondok dilibatkan oleh K.H. Hamid dalam kegiatan kampanye. Padahal santri yang jabatannya sebagai keamanan pondok statusnya sama dengan santri yang lainnya, yaitu sama-sama sebagai santri aktif. Realitas ini membenarkan asumsi bahwa dengan segala pengaruhnya kiai bisa memanfaatkan santrinya untuk mendongkrak perolehan suara bagi calon pemimpin yang didukung kiai.

Melihat pernyataan dan pandangan pengasuh, para santri dan alumni di atas, dapat ditemukan bahwa demokratisasi politik di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi karena demokrasi mengajarkan bahwa perilaku yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar

³⁷ Moh. Afifurrahman, *Wawancara*, 24 Agustus 2012.

yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut ada nilai-nilai tertentu secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh setiap individu.

Pendidikan politik mencoba mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan diterapkan pada warga negara sebagai landasan pola pikir dalam membangun partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik warga negara dapat diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan politik yang didasarkan pada kebebasan memilih dan menentukan keputusan yang di buat. Dengan demikian pendidikan politik menghargai hak setiap individu untuk memilih dan mengambil keputusan politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta berpartisipasi dalam sistem yang ada.

Pendidikan politik memiliki tujuan untuk menarik individu untuk memahami politik sehingga menjadi warga negara yang bertanggungjawab dengan mencoba bagaimana menganalisa dan memberikan penilaian terhadap situasi politik yang sedang berlangsung secara mandiri.

Apabila pola yang dilakukan cenderung searah, yaitu secara sepihak memposisikan santri sebagai yang dirugikan tentunya kesimbangan dalam sistem budaya pesantren itu belum tercapai. Artinya kepatuhan tersebut hanya didasarkan pada atas tradisi yang keliru dan dapat dikatakan sebagai non-ideologis, tetapi hanya merupakan cikal entropi kultural pesantren karena tidak menempatkan pesantren sebagai lembaga yang independen atau mandiri dalam eksistensi budayanya.

Namun, dari sisi yang berbeda kita dapat menemukan nilai-nilai demokrasi dipesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang berupa musyawarah. Dimana hal ini sebagian langkah positif untuk mengembangkan demokrasi dengan dibukanya kran kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat. Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat seharusnya didasari oleh semangat saling mengingatkan terhadap hal kebenaran dan kesabaran. Dalam rutinitas sehari-hari, sering terjadi proses tukar pendapat dan pandangan (musyawarah) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya mencari pemecahan terhadap suatu masalah.

Perdebatan dan adu argumentasi dalam musyawarah tidaklah dipandang jelek apabila dilandasi oleh semangat mencari kebenaran dan meraih *maslahat*. Dasar-dasar tentang anjuran untuk bermusyawarah dapat kita jumpai dalam beberapa firman Allah, diantaranya: “Dan segala urusan mereka, dimusyawarahkan diantara mereka”. (Q.S.42:38),³⁸ “Dan bermusyawarahlah dengan mereka pada segala urusan, maka apabila engkau telah ‘azamkan (membulatkan cita-cita) bertawakkallah kepada Allah; Bahwasanya Allah menyertai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”. (QS.3:159).³⁹

Praktek musyawarah seringkali dilakukan oleh Rasulullah. apabila hendak memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kemashlahatan umum, beliau diperintahkan untuk mengemukakan segala sesuatu urusan duniawi yang berkenaan dengan masyarakat umum kepada orang yang ahli

³⁸ al-Qur’an, 42: 38

³⁹ Ibid., 3: 159

dikalangan sahabat yang dapat dipandang sebagai wakil para rakyat pada umumnya.⁴⁰ Inilah pelajaran yang amat berharga dari al-Qur'an dan rosulullah tentang pentingnya musyawarah yang menjadi dasar-dasar demokrasi.

Pelaksanaan musyawarah di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dapat dilihat ketika lembaga yang ada dibawah naungan pesantren dikelola secara mandiri oleh pengelola lembaga tersebut. Para pengelola lembaga tersebut diberikan wewenang secara penuh untuk mengelola lembaga yang ada untuk dikembangkan dengan sistem dan undang-undang yang berlaku. Peraturan tersebut biasanya dimusyawarahkan setiap lima tahun sekali yang melibatkan seluruh pengelola lembaga (kepala sekolah, guru/*ustād*, wali santri).⁴¹

Hal senada diungkapkan oleh Ruslan, ia mengatakan bahwa dalam memilih ketua pengurus, kordinator instansi atau lembaga, dan yang lainnya, semua itu dilakukan dengan cara bermusyawarah di antara santri senior dan pengelola pesantren, namun demikian hasil musyawarah tersebut pada akhirnya akan disampaikan kepada kiai untuk mendapatkan pertimbangan dan restu, seperti yang disampaikan oleh Ruslan dalam wawancara:

Ada pergeseran pemahaman, dulu pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam, kiai adalah segala-galanya, tetapi beliau sering mengatakan kepada santri bahwa fanatik kepada apapun tidak boleh kecuali pada Islam, dan model kepengurusannya tetap menggunakan musyawarah, juga dalam hal apapun baik dalam memilih ketua pengurus, memilih kordinator instansi dan hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada pengasuh untuk

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Al Islam II* (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), 604.

⁴¹ Ahmad Masykur , *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012 .

mendapatkan restu, tentunya dengan hasil musyawarah dan beliau juga beristikhoroh beberapa hari, biasanya berselang satu sampai setengah bulan baru keluar rekom dari beliau.⁴²

Pernyataan Ruslan ini menunjukkan segala sesuatu akhirnya berada di tangan K.H. Hamid, karena beliau adalah pemegang otoritas dan memiliki hak veto di pesantren. Hal ini disebabkan pesantren meyakini satu hal tentang demokrasi, yaitu demokrasi yang ada di pesantren adalah demokrasi terpimpin, seperti pernyataan K.H.R. Moh. Hasan AH sebagai berikut:

Pesantren meyakini satu hal tentang demokrasi yaitu demokrasi terpimpin, itu sudah menjawab semuanya. Demokrasi terpimpin adalah kiai membebaskan hal apapun tetapi jangan bersifat prinsipil. Kiai mempunyai hak veto yang mutlak dan semuanya memahami hal itu. Pertimbangannya mungkin pertimbangan *istikhoroh*, tapi kiai menghargai yang tidak keluar dari jalur. Alhamdulillah sejauh ini santri menerima semua, karena mereka paham, ini hanya proses pembelajaran. Di pesantren Bata-Bata mengajarkan demokrasi itu ada, tapi demokrasi terpimpin. Kami tidak mengikuti demokrasi liberal, artinya kami mengikuti demokrasi yang berasaskan Islam, demokrasi yang berasaskan akhlak.⁴³

Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Sebagai lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan, sosial, budaya dan agama, sudah berusaha menempatkan segala sesuatunya dalam bingkai Islam. Nilai etika dan moralitas Islam merupakan materi pokok yang harus ditanamkan sejalan dengan tujuan dari pada pendidikan Islam itu sendiri, yakni kesempurnaan dan keutamaan jiwa. Untuk mencapai kesempurnaan ini, penda-gunaan kecakapan akal rasional dan penalaran seharusnya dikembangkan seluas-luasnya, jangan sampai salah satu diantaranya terjadi penyumbatan oleh sistem yang beku dan kaku.

⁴² Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 27-September-2012.

⁴³ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

Sementara itu, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pesantren, diakui atau tidak, pada umumnya masih dipengaruhi oleh model-model tradisional yang berpegang pada otoritas mutlak seorang guru atau Kiai. Sehingga upaya pencapaian kearah kesempurnaan jiwa manusia yang menjadi tujuan dari pendidikan mengalami banyak kendala.

Anggapan bahwa “pesantren dapat diumpamakan sebuah kerajaan kecil” merupakan kendala dalam mengembangkan budaya demokrasi di lingkungan pesantren. Dunia pesantren, bila ia dapat dikatakan demikian, adalah sebuah miniatur dari kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Sedangkan, model masyarakat yang paling ideal adalah sistem sosial kemasyarakatan yang pernah dikembangkan oleh Rasulullah saw semasa di Madinah. Sistem inilah yang disebut sebagai sistem pemerintahan madani (*civil society*).

Dalam sistem sosial yang dikembangkan, keberadaan Rasulullah sebagai pemegang otoritas wahyu dan hukum *shar'ī* masih tetap diperhitungkan. Segala masalah hukum dikembalikan kepada beliau untuk dimintai *fatwā*. Namun, apabila terdapat hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan kaum muslimin, kebijakan yang diambil Rasulullah adalah cara dengan mengumpulkan para sahabat yang dipilih dari kalangan cerdik cendekia, diakui integritasnya serta dianggap mampu mewakili kaumnya di forum musyawarah berguna mencari solusi terbaik. Didalam forum tersebut, masing-masing memberikan pendapat dan masukan kepada Rasulullah sebagai bahan-bahan pertimbangan.⁴⁴

⁴⁴ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Al Islam II* (Jakarta : Bulan Bintang, 1977). 604.

Sebagai pimpinan tertinggi kaum muslimin, Rasulullah menunjukkan sifat yang sangat bersahaja, tidak alergi terhadap kritik dan saran, walaupun dari seorang suku Badui sekalipun. Dalam urusan-urusan duniawi, beliau lebih mempercayakannya kepada para sahabat yang dianggap ahli dan diterima oleh masyarakat. Beliau hanya bertindak sebagai pengontrol yang juga memperhatikan suara umat.

Konsep “pesantren sebagai sebuah kerajaan kecil” sama sekali bukan bentuk yang ideal bagi pengembangan demokratisasi dunia pesantren. Bahkan, asumsi ini justru membuat batasan non visual dan menciptakan kesenjangan antara pribadi kiai dan santri. Keadaan ini tentunya kurang baik bagi proses pengembangan potensi diri santri.

Kesenjangan yang terjadi dalam proses interaksi sosial antara kiai dan santri ini menimbulkan akses negatif dalam bentuk ikatan batin semu antar kedua belah pihak, yang akan mudah terkikis oleh waktu. Ikatan batin yang terbentuk hanya menyentuh pada permukaan dimensi terluar dari hubungan antara guru dan murid lebih banyak didasari oleh perasaan segan, sungkan, takut kwalat, dan sebagainya. Demikian pendidikan dilakukan tidak dapat mencapai pada tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Dengan berkembangnya demokrasi dalam dunia pesantren, akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan terhadap setiap individu yang menjadi elemen dari pondok pesantren. Dengan terbukanya suasana demokratis, diharapkan masing-masing pihak dapat berlomba-lomba dalam kebajikan (*fāstabiqu al-khairāt*).

Dari gambaran tentang demokratisasi pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sebagai dampak dari peran politik pengasuh ditemukan: *Pertama*, demokratisasi dalam bentuk partisipasi politik warga pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tentang pilihan politik masih terpatron kepada kiai. Pilihan politik yang di dasarkan pada kebebasan memilih dan menentukan keputusan yang di buat sendiri tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Karena demokrasi menghargai hak setiap individu untuk memilih dan mengambil keputusan politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta berpartisipasi dalam sistem yang ada.

Kedua, pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata menganut sistem demokrasi terpimpin, yaitu segala sesuatu pada akhirnya berada pada keputusan kiai.

2. Kompensasi Ekonomi dan Politik Pragmatis

Setidaknya ada beberapa karakteristik kiai dalam mendukung atau menentukan kemenangan bagi calon, *pertama*, kiai yang berani terjun langsung ke gelanggang Pilkada. Keberanian kiai untuk terjun langsung dalam arena pilkada sangat mendukung perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain itu, keberanian kiai untuk terjun langsung dalam gelanggang politik akan berimplikasinya nyata dalam perubahan pesantren dan tentunya pundi-pundi kekayaan kiai akan bertambah dengan sendirinya. Lebih dari itu, jaringan kiai dengan kekuasaan (pemerintah) semakin kokoh. Hal ini akan semakin mengokohkan peran dan posisi kiai di tengah masyarakat.

Namun, apa yang telah dilakukan oleh kiai dalam mendukung pasangan calon pada dasarnya berorientasi pada faktor ideologi, *amar ma'rūf nahī munkar*. Ada pun nantinya ada hadiah yang diberikan oleh pasangan calon kepada kiai semata-mata sebagai ucapan terima kasih, dan bukan merupakan tujuan utama dalam berpolitik. *Kedua*, kiai yang masih canggung dalam berpolitik. Karakteristik kiai seperti ini kurang dapat mendukung perjuangan memperoleh kemenangan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Walaupun pesantren mereka mendapat bantuan dari pasangan calon saat kampanye, namun keberlanjutan bantuan akan berhenti karena pasangan calon yang didukung tidak menduduki posisi penting di pemerintahan. Namun, jaringan kerja secara pribadi dan kelembagaan masih terus di jalin.

Ketiga, kiai karena kultur yang mengharuskan dia untuk membebaskan atau menyerahkan sepenuhnya pilihan politik kepada masyarakat sendiri. kiai hanya sebagai jembatan penghubung dengan masyarakat, kewajiban untuk meyakinkan dan menindaklanjuti apa yang telah dilakukan kiai diserahkan sepenuhnya kepada mesin partai pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati.⁴⁵

Liberalisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin massif di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpa pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh kiai dan masyarakat. Biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi berdampak langsung pada kondisi finansial pesantren.

⁴⁵ Rudi Subiyakto, Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006), *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2011), 48-49.

Situasi tersebut sering mendorong para kiai dan pengelola pesantren memikirkan cara-cara lain yang mudah dan efektif untuk memperoleh bantuan yang bisa digunakan dalam pembangunan pesantren. Tidak jarang pesantren menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam politik kekuasaan yang dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru. Dengan pengaruh sosial dan politik yang kuat di masyarakat, pesantren dapat melakukan *bargaining* politik dengan para politisi yang memerlukan dukungan politik pesantren, dari sekadar dukungan moril dan pembentukan citra hingga mobilisasi suara rakyat dalam Pemilu, Pilpres, atau Pilkada. Meskipun secara terbuka pihak pengelola pesantren sering membantah melakukan tawar-menawar politik dengan kompensasi ekonomi.

Dampak lain dari keterlibatan pesantren dalam politik juga terlihat pada perubahan sarana fisik pesantren. Hal itu membenarkan penjelasan teori ekonomi politik deterministik yang memandang bahwa interaksi-interaksi politik selalu bermotif ekonomi.⁴⁶ Pesantren menjadikan pengaruh dan legitimasi sosial kegamaan yang dimilikinya sebagai bahan dalam tawar-menawar dengan kepentingan kelompok politik. Bantuan-bantuan material kerap kali datang ke pesantren sebagai buah dari

⁴⁶ Hubungan sistematis dalam teori ekonomi politik dapat dilihat pada tiga kemungkinan. Pertama, terdapat hubungan kausal antara ekonomi dan politik yang dalam hal ini sering disebut model ekonomi politik deterministik. Model ini mengasumsikan ada hubungan deterministik antara ekonomi dan politik, yakni politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan institusi ekonomi menentukan proses-proses politik. Kedua, ada hubungan timbal-balik antara ekonomi dan politik yang sering disebut model ekonomi politik interaktif. Fungsi-fungsi politik dan ekonomi dianggap berbeda namun saling memengaruhi satu sama lain. Ketiga, terdapat hubungan perilaku yang berkelanjutan atau kontinu antara ekonomi dan politik. Martin Staniland, "*What is Political Economy?: A Study of Social Theory and Underdevelopment*", dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Erlangga, 2003), 9.

konsensus politik yang dilakukan. Hal itu memunculkan rumor tentang politik uang yang sering dipelesetkan menjadi *hight cost politics*.

Semua asumsi di atas mengarah kepada K.H. Hamid sebagai pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang terlibat dalam pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pamekasan tahun 2008. Dalam perkembangannya pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata berkembang sangat pesat baik sarana prasarana maupun yang lainnya.

Perkembangan sarana dan prasarana di pondok Mambaul Ulum Bata-Bata dalam kurun waktu 2-5 tahun sangat pesat, akan tetapi perkembangan tersebut tidak disebabkan karena para pengasuhnya banyak mendapatkan bantuan dari bupati yang didukungnya, melainkan karena banyak dibantuan oleh para alumni pesantren serta program-program yang ditawarkan diterima oleh masyarakat serta kualitas pendidikan di pesantren ini.

Sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa perkembangan yang sangat pesat di pesantren ini disebabkan para pengasuhnya mendukung salah satu pasangan calon bupati yang menjadi pemenang pada Pilkada tahun 2008, dan sampai sekarang masih memimpin Pamekasan. Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata diisukan menerima banyak bantuan dari pemerintah setempat, padahal semua yang dituduhkan tidak benar. Namun, apabila pesantren ini tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah setempat atau bantuan-bantuan lain dari pemerintah provinsi atau pusat juga tidak benar.

Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata menerima bantuan secara wajar, seperti pesantren, yayasan atau lembaga lainnya yang juga menerima bantuan. Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata berhak menerima bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana pesantren yang lain juga berhak menerima bantuan. Pesantren ini mau menerima bantuan apabila bantuan tersebut tidak mengikat, misalnya bantuan dari calon bupati kepada pesantren yang mengharuskan pesantren mendukung calon bupati tersebut.

K.H. Hamid dalam mendukung calon bupati memiliki kontrak politik yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kontrak politik yang dibuat bersifat umum dan tidak bersifat pribadi untuk kepentingan kiai atau pesantren. Dana untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata banyak berasal dari alumni pesantren. Selain dari alumni, dana tersebut berasal dari keuangan pesantren. Sebagaimana yang disampaikan oleh K.H. Moh. Hasan dalam wawancara sebagai berikut:

Perkembangan sarana dan prasarana di pondok kami sangat pesat, akan tetapi perkembangan tersebut bukan disebabkan karena kami berperan serta dalam politik. Sebagian masyarakat menilai perkembangan pondok kami disebabkan kami mendukung salah satu pasangan calon bupati yang sekarang memimpin Pamekasan. Kami diisukan menerima banyak bantuan dari pemerintah kabupaten Pamekasan, padahal semua itu tidak benar. Namun, apabila kami tidak pernah menerima bantuan itu bohong. Kalau misalnya pondok-pondok lain atau yayasan lain menerima bantuan, apakah kami juga tidak berhak menerima bantuan tersebut? Karena bantuan-bantuan yang diterima oleh mereka kami juga berhak karena itu juga hak kami. Kami mau menerima bantuan Kalau bantuan itu tidak mengikat kami, kontrak politik yang kami buat bersama pasangan calon bupati adalah kontrak politik yang bersifat umum tidak bersifat pribadi untuk kami atau pesantren kami. Perkembangan sarana dan prasarana di pondok banyak berasal dari

alumni pondok kami, sumbangsih mereka sangat besar kepada kami, selain itu juga dari keuangan pondok kami.⁴⁷

Hal ini juga ditegaskan oleh Ruslan⁴⁸ bahwa alumni menyisihkan sebagian rejekinya untuk pembangunan sarana dan prasarana di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Penyisihan sebagian rejeki yang dilakukan oleh alumni karena mereka bersimpati atas perkembangan pendidikan di pesantren. Disamping itu para pemimpin yang telah didukung oleh kiai merasa berhutang jasa, sehingga para penguasa tersebut memberikan bantuan finansial maupun moral terhadap pembangun pesantren, akan tetapi bantuan yang diberikan oleh para pemegang jabatan ini tidaklah sebanyak yang kita bayangkan bila dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh para alumni, wali santri serta masyarakat.

Lebih lanjut Ruslan mengatakan bahwa pesantren tidak mendapatkan keuntungan finansial dalam mendukung salah satu pasangan calon bupati. Menurutnya, mendukung maupun tidak pesantren masih memiliki alumni dan wali santri yang cukup banyak untuk membantu dari segi finansial dalam membangun sarana dan prasarana pesantren. Sedangkan keuntungan dari segi non-finansial adalah para pengasuh pesantren dapat memberikan masukan yang positif kepada pemerintah setempat untuk perkembangan daerah yang lebih baik pendidikan, sosial, budaya maupun politik.

K.H. Moh. Hasan menegaskan bahwa dalam mendapatkan bantuan, pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sama seperti pesantren atau lembaga yang lainnya. Pesantren tidak menjadi spesial di mata pemerintah. Apabila

⁴⁷ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

⁴⁸ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata diprioritaskan oleh pemerintah, maka kondisi santri dan sarana prasarana di pesantren menjadi lebih baik, tidak seperti sekarang yang kekurangan lokal, baik lokal kelas untuk aktifitas pembelajaran maupun lokal kamar untuk santri beristirahat. Dengan kurangnya lokal kamar tidur, membuat kondisi santri khususnya santriwati sekarang banyak yang tidur di masjid pondok putri.

K.H. Moh. Hasan juga mengatakan bahwa apabila memperhitungkan persoalan materi, maka bantuan yang telah diberikan pemerintah kepada pesantren tidak ada nilainya, bila dibandingkan dengan kondisi kesehatan K.H. Hamid sampai saat ini masih sakit yang disebabkan oleh terlalu inten berkampanye dalam pemilihan bupati. Seperti yang disampaikan dalam wawancara kepada peneliti:

Bisa dilihat sekarang, santri putri kami kurang lebih 2900 dengan kapasitas kamar 85. Dengan kata lain, 1 kamar berisi sekitar 34-35 orang dengan ukuran kamar sekitar 3x4 meter. Bisa dibayangkan kalau kondisinya seperti itu, mau tidur seperti apa para santri. Selama ini santri lebih banyak tidur di masjid. Jadi kalau kami diisukan spesial dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak benar. Kalau misalnya kami dijadikan anak mas oleh pemerintah, maka keadaan santri kami tidak demikian. Apabila membicarakan kerugian kami dalam Pilbup 2008 sangatlah tidak ternilai harganya, yaitu dengan sakitnya abah kami sampai sekarang, tetapi semua itu kami lakukan hanya untuk kebaikan Pamekasan ke depan.⁴⁹

Dari gambaran tentang kompensasi ekonomi dan pragmatisme politik ditemukan bahwa pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan K.H. Hamid sebagai pengasuhnya dalam mendukung salah satu calon pemimpin, baik Presiden, Gubernur, Bupati maupun mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR tidak mendapatkan keuntungan

⁴⁹ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

finansial maupun fasilitas sarana-prasarana material yang di butuhkan pesantren.

K.H. Hamid dan pengasuh lainnya dalam mengelola Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan sebagai pengasuhnya tidak menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam politik kekuasaan yang dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru. K.H. Hamid juga tidak melakukan *bargaining* politik dengan para politisi yang memerlukan dukungan politik pesantren, dengan melakukan tawar-menawar politik dengan kompensasi ekonomi. Karena pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata sudah memiliki alumni dan wali santri cukup banyak yang siap membantu dari segi finansial.

3. Kualitas dan Kuantitas Santri

Dalam kesehariannya keberadaan seorang kiai biasanya tidak bisa dilepaskan dari peranannya sebagai pengelola lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren. Basis utama kegiatan seorang kiai dalam kesehariannya adalah mengurus santri dan pesantrennya.

Keterlibatan pesantren dan kiai sebagai pengasuhnya dalam politik berimplikasi terhadap eksistensi pesantren. Bagi pesantren yang kainya terlampau sibuk mengurus politik akan berkurang waktu dan perhatiannya dalam mengurus pesantren. Hal itu disebabkan aktivitas politik membuat para kiai harus sering keluar untuk koordinasi, rapat, dan kegiatan politik lainnya. Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik.

Namun tidak demikian bagi pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang diasuh oleh K.H. Hamid, beliau tidak totalitas dalam berperan serta dalam politik seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa KH. Hamid hanya sebagai partisipan partai politik dan hanya sebatas mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Pamekasan, beliau tidak meninggalkan pesantren secara totalitas. K.H. Hamid tetap menjalankan tugasnya di pesantren, hanya disela-sela kegiatannya di pesantren, K.H. Hamid memperjuangkan agama Islam melalui jalur politik. Sehingga aktivitas beliau dalam politik tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan pesantren. Sebagaimana pernyataan Ruslan dalam wawancara:

K.H. Hamid tidak meninggalkan kewajiban sebagai pengasuh di pesantren. Beliau tetap menjalankan kegiatan mengajar kitab kuning dan tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan pesantren yang lainnya, hanya saja di sela-sela kegiatan pesantren beliau memilih memperjuangkan Islam melalui partai politik, karena bagi beliau hal itu sangat strategis.⁵⁰

Ruslan⁵¹ menegaskan bahwa keterlibatan K.H. Hamid dalam kegiatan kampanye hanya sebatas apabila ada jadwal kampanye, selebihnya K.H. Hamid tetap fokus terhadap kegiatan-kegiatan kepesantrenan, seperti mengajar, mengisi pengajian kitab juga melayani tamu. K.H. Hamid cukup bijak dalam mengimbangi jadwal kampanye dengan kegiatan kepesantrenan, sehingga politik praktis yang dijalankannya tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan kepesantrenan.

⁵⁰ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

⁵¹ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

Menjalankan fungsi pendidikan memang menjadi tugas pokok sebuah pesantren. Identitas pesantren adalah lembaga pendidikan, walaupun dalam perjalanannya berbagai fungsi juga dijalankan oleh lembaga ini. Namun demikian, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah yang utama.

Sementara itu, perkembangan pesantren tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi kualitas dan kuantitas santri juga menentukan pesantren dikatakan maju dan berkembang. Peran penting pesantren dalam proses pelaksanaan pembangunan sosial di sektor pendidikan secara khusus tidak senantiasa berada pada titik konstan, tetapi juga mengalami pasang surut.

Seperti contoh, ketika pesantren masih menjadi satu-satunya kiblat pendidikan, peran lembaga pendidikan dengan kiai sebagai figuran tokoh informalnya memiliki posisi dan peran yang sangat menentukan. Tetapi ketika dunia pendidikan semakin dipenuhi oleh lembaga-lembaga modern yang menawarkan keunggulan sistem pendidikan, kurikulum yang terprogram secara sistematis, SDM tenaga pengajar yang handal dan pengelolaan yang profesional, semakin menggeser keberadaan pesantren.

Namun, tidaklah demikian bagi pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, walaupun dunia pendidikan telah dipenuhi oleh lembaga-lembaga yang sudah modern, pesantren Bata-Bata mampu menjawab tantangan tersebut, hal ini terbukti dengan berkembangnya santri/siswa dari segi kualitas maupun kuantitas, misalnya perkembangan santri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Perkembangan santri yang sangat pesat tersebut menurut K.H.R. Moh. Hasan sangat wajar, tidak lantas perkembangan santri dari segi kuantitas tersebut disebabkan oleh adanya tendensi politik dengan berperannya KH. Hamid dan pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang lainnya ke glangang politik, akan tetapi lebih disebabkan oleh faktor program-program pengembangan yang di tawarkan pesantren diterima dengan baik oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara:

Alhamdulillah, perkembangan santri di pondok kami sangat wajar, tidak disebabkan kami berperan dalam politik. Meningkatnya santri kami setiap tahun bukan karena adanya tendensi politik, akan tetapi lebih disebabkan oleh program-program yang kami tawarkan kepada masyarakat diterima dengan baik.⁵²

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ruslan, bahwa pesantren setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan tidak berhenti untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan di pesantren. Dalam mengembangkan pendidikan di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata baik secara kualitas maupun kuantitas K.H. Hamid dan putra-putranya membangun akses, relasi dan kerjasama di luar pesantren. Seperti pernyataan Ruslan dalam wawancara:

Pondok pesantren dari segi kuantitas santri dan sarana-prasana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan Bata-Bata terus membangun tiada henti. Perkembangan tersebut bukan tendensi politik tapi lebih dari usaha-usaha yang dilakukan oleh putra-putra beliau dengan membangun akses, relasi dan kerjasama untuk dunia luar. Bagi santri yang memiliki potensi dalam beberapa bidang pendidikan, dan yang kemudian banyak mendapat bantuan dari pemimpin yang didukung oleh kiai.⁵³

⁵² Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

⁵³ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

Dalam beberapa tahun terakhir K.H. Hamid beserta putra-putranya mengurangi perannya dalam politik praktis. Hal ini dilakukan karena disamping K.H. Hamid dalam 4 tahun terakhir kesehatannya terganggu dan putra-putra beliau khawatir keluar dari konsep sebagai pengayom dan pemerhati masyarakat dan santri, juga disebabkan dinamika yang terjadi di pesantren. Dalam dua tahun terakhir perkembangan santri yang masuk ke pesantren sangat banyak, sementara infrastruktur dari segi sarana dan prasarana belum siap, misalnya dalam dua tahun ini pesantren hanya bisa membangun lokal kelas sebanyak 16 lokal, sedangkan yang harus ditampung lebih dari 2000 santri.

Kondisi seperti ini tidak menjamin tercapainya pembelajaran sesuai yang diharapkan, sementara tekad dari pengasuh terdahulu pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tidak pernah membatasi jumlah santri yang masuk, dengan satu tekad bahwa pesantren akan melayani dan tidak akan mematahkan keinginan orang untuk sekolah. Andaikata pesantren membatasi sesuai kapasitas yang ada mungkin lebih terarah, lebih fokus, lebih terjamin kualitasnya. Hal ini sangat sulit untuk dicapai apabila pengasuh tidak fokus terhadap pesantren.⁵⁴

Untuk mengatasi problem tersebut, para pengasuh dan pengelola lembaga yang berada dibawah naungan pesantren mencari solusi yang inovatif, diantaranya berupaya untuk meningkatkan kualitas guru atau ustad, meningkatkan potensi kursus di asrama untuk mengejar ketertinggalan santri/siswa di kelas. Di pesantren sudah diterapkan program

⁵⁴ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

yang bisa meningkatkan kualitas santri seperti program akselerasi pembelajaran yang dilakukan di luar jam sekolah pendidikan formal. Seperti yang disampaikan kepada peneliti:

Kami terus mencari solusi yang inovatif, kadang kita kembali pada konsep bahwa “keterbatasan jangan sampai menjadi pembatas”, jadi kami mensiasati dalam beberapa hal, diantaranya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas gurunya dan meningkatkan potensi kursus di asrama untuk mengejar ketertinggalan mereka di kelas. Kita memadukan peran Dewan *Madrāsiyah* atau Komite Sekolah yang membawahi semua jajaran sekolah klasikal yang ada di Bata-Bata. Ada Dewan *Ma’hādiyah* yang membidangi kepesantrenan yang kita sinergikan. Di Bata-Bata sekarang sudah menjamur program-program yang bisa meningkatkan kualitas santri, misalnya membaca cepat baca kitab kuning, kursus cepat bahasa arab dan bahasa inggris, kursus cepat bilingual, fikih dan lain sebagainya, itu langkah inovatif dari keterbatasan yang kami miliki.⁵⁵

Dari gambaran di atas ditemukan bahwa perkembangan santri dari segi kuantitas di pesantren Mambul Ulum Bata-Bata tidak disebabkan adanya tendensi politik yaitu keterlibatan para pengasuh pesantren dalam politik, melainkan karena program-program pendidikan yang ditawarkan oleh pesantren diterima oleh masyarakat.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren untuk *out-put* santri yang berkualitas, para pengasuh dan pengelola lembaga yang berada dibawah naungan pesantren disamping meningkatkan kualitas guru atau ustad, juga meningkatkan potensi kursus di asrama untuk mengejar ketertinggalan santri/siswa di kelas. Misalnya, diterapkannya program-program akselerasi pembelajaran yang dilakukan di luar jam sekolah pendidikan formal.

⁵⁵ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

4. Perbedaan pilihan politik kiai dan santri.

Dampak lain dari peran politik kiai terhadap pesantren adalah tentang perbedaan pilihan politik antara kiai dan santrinya. Posisi santri merupakan posisi yang signifikan dalam menentukan kemenangan pilihan politik kiai. Karena santri merupakan aset terbesar dalam memberikan dukungan terhadap pilihan politik kiai. Sementara kesetiaan santri terhadap kainya tidak diragukan lagi. Mereka senantiasa membela dan mendukung terhadap apa yang menjadi pilihan politik kainya.

Dengan demikian makna politik bagi santri merupakan sebuah pengabdian dan loyalitas yang harus dilakukan. Namun demikian tidak semua santri senantiasa membela dan mendukung terhadap pilihan politik kainya. Perbedaan pilihan politik antara santri dengan kainya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya ikatan keluarga, partai politik, institusi dan lain sebagainya.

Di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata juga terjadi kasus semacam ini, tidak semua santri pilihan politiknya sama dengan kainya, namun respon yang ditunjukkan oleh para santri tersebut kepada kainya berdeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Moh. Afifurrahman, sikap santri tersebut tidak menunjukkan hal yang dipandang adanya pembangkangan terhadap kiai, begitu juga sikap kiai yang tidak mempermasalahkan hal tersebut.⁵⁶

Namun tidak semua santri yang berbeda pilihan politik dengan kainya tidak mempermasalahkan adanya perbedaan tersebut. Terdapat

⁵⁶ Moh. Afifurrahman, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

beberapa santri yang merespon atau menyikapi dengan nada negatif terhadap K.H. Hamid selaku kiaiinya. seperti yang diungkapkan oleh Moh.

Husen dalam wawancara:

Respon santri yang pilihan politiknya berbeda dengan kiai ada yang biasa-biasa saja dan juga ada yang responnya negatif, seperti mengkritisi kiai sampai ada yang mencela kiai.⁵⁷

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ahmad Masykur bahwa sikap negatif ditunjukkan oleh santri yang tidak sejalan dengan K.H. Hamid mengenai pilihan politik, baik santri yang masih aktif maupun yang sudah menjadi alumni. Namun menurut Masykur bahwa sikap santri tersebut tidak sampai bersifat prinsipil, seperti halnya sikap pembangkangan terhadap pengasuh. Lebih lanjut Masykur menyampaikan bahwa sikap santri tersebut tidak hanya pada permasalahan politik, akan tetapi juga pada permasalahan kebijakan pengasuh tentang kepesantrenan. Seperti yang disampaikannya dalam wawancara sebagai berikut:

Bahwasannya kiai tidak pernah memaksa, hanya saja kiai sejak awal mendidik yang baik, sehingga pilihan apapun kalau prinsipnya sama dengan kiai maka secara otomatis santri selalu ikut. Permasalahan ada yang tidak sama, tidak sampai pada yang sifatnya prinsipil.⁵⁸

Adapun permasalahan tentang terjadinya kasus sebuah pesantren perlahan-lahan ditinggalkan oleh para santrinya dan tidak lagi diminati oleh masyarakat, hingga pesantren itu akhirnya mati, bukan karena tidak bisa menjawab tuntutan kemajuan masyarakat, melainkan justru karena faktor kiaiinya masuk dalam salah satu partai politik tidak terjadi di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.

⁵⁷ Moh. Husen, *Wawancara*, Pamekasan, 4 september 2012.

⁵⁸ Ahmad Masykur, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

Walaupun tidak terjadi kasus yang demikian, tetapi di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata ditemukan kasus beberapa santri yang meninggalkan pesantren disebabkan perbedaan pilihan politik dengan pengasuh, sebagian santri yang meninggalkan pesantren tersebut bukan karena K.H. Hamid masuk dalam partai tertentu, akan tetapi lebih disebabkan adanya perbedaan pilihan politik antara KH. Hamid dengan beberapa santrinya (baik berasal dari pribadi santri maupun dari wali santri) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan pada Pilkada tahun 2008. Seperti yang dikatakan oleh Ali Qowi kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut:

Yang saya ketahui ada sekitar lima santri yang berhenti disebabkan perbedaan memilih bupati, pada akhir tahun 2008. Perbedaan tersebut antara wali santri dengan kiai, juga antara santri dengan kiai.⁵⁹

Namun berbeda dengan yang diungkapkan oleh K.H. Moh. Hasan tentang santri yang meninggalkan pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Berhentinya santri dari pesantren sejauh yang diketahui olehnya adalah lebih disebabkan santri tersebut masa studinya sudah selesai dan memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, juga banyak yang disebabkan oleh santri tersebut sudah tidak memiliki biaya untuk kebutuhan dirinya di pesantren.

Jadi, menurut K.H. Moh. Hasan tidak benar kalau santri yang meninggalkan pesantren disebabkan oleh perbedaan pilihan politik dengan pengasuh, karena santri yang berada di pesantren sangat majemuk, santri

⁵⁹ Moh. Ali Qowi, *Wawancara*, Pamekasan, 4 September 2012.

yang ada di pesantren juga banyak dari putra-putri tokoh partai yang berbeda dengan partai yang didukung oleh pengasuh.⁶⁰

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ahmad Masykur. Ia mengungkapkan bahwa motif atau alasan permasalahan santri yang berhenti dari pesantren itu dapat diketahui apabila santri tersebut berpamitan kepada pengasuh dan tentunya motif atau alasannya berbeda-beda antara santri yang satu dengan yang lainnya. Sejauh yang Ahmad Masykur ketahui, tidak ada santri yang berpamitan kepada pengasuh dengan alasan berbeda pandangan politik dengan pengasuh. Ia juga mengatakan bahwa kalau misalnya terdapat santri yang berhenti dari pesantren karena perbedaan pilihan politik dengan pengasuh, hal itu tidak diketahui olehnya.⁶¹

Perbedaan dalam hal pilihan politik ini tidak hanya terjadi antara kiai dengan santrinya, akan tetapi juga terjadi pada kiai dengan sebagian alumni santri pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan secara umum juga terjadi dengan masyarakat. Dikalangan alumni sempat terjadi ketidak harmonisan antar alumni dan antara alumni dengan pengasuh. Terjadinya pengkotakan dalam tubuh alumni ini disebabkan karena perberbedaan dalam pilihan politik dan saling mempertahankan kebenaran atas keyakinan dan pendapatnya masing-masing.

Alumni yang pilihan politiknya berbeda dengan K.H. Hamid beralasan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati diusung PPP dan mempertahankan dukungannya terhadap PPP. Sedangkan para pengasuh

⁶⁰ Moh. Hasan AH, *Wawancara*, Pamekasan, 24 Agustus 2012.

⁶¹ Ahmad Masykur, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

pesantren Mambaul Ulum mendukung calon yang diusung dari partai PBB dan GOLKAR. Faksi-faksi di tubuh alumni dan ketidaksepahaman antara pengasuh dengan beberapa alumni ini menurut Ruslan hanya bersifat sementara, karena setelah Pilkada kabupaten Pamekasan pada tahun 2008 selesai, kiai tetap menerima kepada semua alumni walaupun mereka berbeda dengan beliau.⁶²

K.H. Hamid dan pengasuh yang lainnya termasuk putra-putra beliau sejak dulu hanya sebagai partisipan PPP. Walaupun salah satu dari putra K.H. Hamid yaitu K.H. Moh. Hasan sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua Gerakan Pemuda Ka'bah. Namun, pada tahun 2008 sampai sekarang mereka semua sudah tidak menjadi partisipan PPP karena perbedaan aspirasi dengan pengurus PPP.

Hal ini terjadi karena perbedaan dukungan terhadap calon bupati pada Pilkada kabupaten Pamekasan tahun 2008, KH. Hamid mendukung pasangan KH. Kholilurrahman dan Kadarisman Sastrodiwirjo yang diusung oleh PBB, GOLKAR dan 11 partai non parlemen, sedangkan PPP yang berkoalisi dengan partai Demokrat, PAN, PDI-P dan Partai Patriot mendukung pasangan Ach. Syafi'i Yasin dan Sohebuudin, serta ditopang oleh kekuatan PKNU.

Suasana ini sangat menarik untuk kita lihat karena pada pemilihan bupati sebelumnya yaitu pada tahun 2003 K.H. Hamid mendukung Ach. Syafi'i Yasin yang berpasangan dengan Kadarisman Sastrodiwirjo sebagai calon bupati dengan pengusung utamanya adalah kekuatan dari PPP keluar

⁶² Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

sebagai pemenang. Ketidak harmonisan antara Ach. Syafi'i Yasin dengan pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tersebut berujung pada K.H. Hamid tidak lagi mendukung Ach. Syafi'i Yasin sebagai calon bupati pada Pilkada Kabupaten Pamekasan tahun 2008. Sehingga dalam pertarungan pesta demokrasi tersebut Ach. Syafi'i Yasin mengalami kekalahan sebagai bupati Pamekasan.

Terjadinya faksi-faksi ditubuh alumni tidak dibiarkan begitu saja oleh pengasuh, putra-putra beliau serta alumni yang sepaham dengan K.H. Hamid. mereka mengadakan konsolidasi antar alumni pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Sehingga, menemukan kata yang sama, aspirasi yang selaras dan kesolidanpun akhirnya tercipta kembali.⁶³

5. Resistensi Masyarakat terhadap Pesantren

Perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu berada dalam tarik-menarik dua kutub pendapat yang kontradiktif. Yakni antara pendapat yang mengabsahkan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, serta pendapat yang mengkritiknya dengan keras sebagai pengingkaran terhadap fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi politik.

Pendapat yang *pertama*, mengasumsikan bahwa komunitas pesantren, bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lainnya. Hal ini didukung oleh argumentasi teologis yang membenarkan pilihan politik praktis. Pendapat ini semakin kukuh apalagi didukung oleh realitas semakin banyaknya

⁶³ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.

pemimpin pesantren (kiai) yang terjun dalam dunia politik langsung maupun tidak.

Pendapat *kedua*, mengkritik dengan keras, bahwa keterlibatan pesantren dalam dunia politik lebih banyak bahaya dari pada manfaatnya.⁶⁴ Hal ini mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap “kotor”, maka keterlibatan pesantren dalam dunia politik bagaimanapun baik dan kokohnya landasan serta argumentasi teologisnya, akan ikut terseret kedalam dunia yang “kotor” pula.

Perdebatan seperti ini memang tidak akan pernah selesai, sebab masing-masing akan menunjukkan berbagai argumentasi etis maupun praksis untuk mendukung pendapatnya.

Secara tradisional masyarakat memandang pesantren sebagai sumber legitimasi moral. Kiai dan pesantren adalah panutan serta pembimbing umat. Sebagai sumber moral dan panutan umat, pesantren diharapkan menjadi teladan dalam mempraktikkan Islam ke dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, kiai dan komunitas pesantren tentu harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak kewibawaan dan integritas, semisal melibatkan pesantren dalam politik praktis. Memang tidak selamanya politik praktis merupakan “barang kotor”, tetapi pemahaman masyarakat umum telah menempatkannya sebagai media persaingan perebutan kekuasaan.

Para kiai pesantren tentu akan menerima imbas dari persepsi umum tersebut. Konsekuensinya, predikat *uswatun hasanah* pesantren tentu akan

⁶⁴ Khoirudin, *Politik Kiai*, ix-x.

tercerabut legitimasi sosialnya. Petuah, nasihat, dan fatwa yang dikeluarkan kiai akan dibaca dalam konteks politik.

Sejauh ini, ada beberapa bentuk resistensi masyarakat terhadap keterlibatan politik pesantren. Pertama, masyarakat menilai pesantren yang terlalu politis akan tercerabut dari fungsi-fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Bahkan secara mencolok sebagian orang tua yang kritis menolak memasukkan anak mereka ke dalam pesantren yang terlalu terlibat politik.⁶⁵

Kedua, resistensi yang paling nyata tentu pembangkangan politik yang dilakukan oleh masyarakat untuk tidak memilih partai yang didukung secara khusus oleh pesantren. Hal itu tentu menarik karena kontradiktif dengan temuan Bolland bahwa masyarakat Muslim tradisional selalu mendukung sikap politik yang dianut tokoh agama atau pesantren.⁶⁶

Mungkin fenomena pesantren dan politik yang terjadi di Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dapat membantu menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran sikap politik pemilih Muslim, dari tipologi ideologis dan kharismatis ke sikap politik yang lebih rasional. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin mampu membedakan antara sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati, dan diteladani serta sikap pesantren yang sarat politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.

⁶⁵ Patoni, *Peran Kiai*, 162.

⁶⁶ Bolland, *The Struggle of Islam*.

Keterlibatan K.H. Hamid dalam dunia politik berimbas kepada masyarakat sekitar yang terjadi tarik-menarik antara yang mengabsahkan dan tidak mengabsahkan keterlibatan K.H. Hamid dalam dunia politik. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh pesantren adalah adanya *image* negatif terhadap pesantren dan terhadap K.H. Hamid sebagai pengasuhnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ruslan, ia mengatakan bahwa terjadi kontradiktif dalam masyarakat tentang pesantren yang ikut andil membangun negara ini melalui jalur politik. Disatu sisi, masyarakat menginginkan pesantren berada di jalur pendidikan sesuai dengan fungsi keberadaannya, tidak ikut andil dalam dunia politik, akan tetapi di sisi lain juga terdapat masyarakat yang menginginkan pesantren dalam membangun negara ini melalui jalur pendidikan dan politik.

Pendapat yang kedua ini diamini oleh Ruslan, ia mengatakan bahwa dalam membangun negara ini tidak hanya dengan pendidikan saja, akan tetapi juga dengan pemerintahan yang baik, dan hal itu mengharuskan kita bergerak dalam dunia politik, terutama dalam pemilihan-pemilihan pemimpin seperti bupati, gubernur dan presiden.⁶⁷

Ruslan melanjutkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari masyarakat yang tidak setuju dengan pesantren memilih jalur politik dan pendidikan sebagai perjuangan untuk berdakwah serta masyarakat yang pilihan politiknya berbeda dengan K.H. Hamid minimalnya terdapat keengganan untuk memondokkan putra-putrinya ke pesantren Mambaul

⁶⁷ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

Ulum Bata-Bata, juga menjelek-jelekkkan pesantren, seperti yang disampaikan kepada peneliti:

Kalau kampanye jangan mondok disini tentunya tidak ada, tetapi kalau yang menjelek-jelekkkan itu pasti banyak, karena itu berkaitan dengan dukung mendukung dan itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah kompetisi, apalagi yang kalah pasti kecewa.⁶⁸

Namun, adanya *image* negatif terhadap pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tidaklah separah yang kita bayangkan, karena dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap kuantitas santri, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya santri yang masuk kepesantren setiap tahunnya, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Masykur, ia mengatakan bahwa masyarakat masih percaya terhadap pesantren dalam membina putra-putri mereka, ia juga mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah mulai sadar bahwa selain mencari ilmu itu sebuah kewajiban, mendapatkan ijazah setelah selesai jenjang pendidikan yang telah ditempuh itu juga sangat penting. Hal tersebut bukan hanya terjadi di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, akan tetapi juga terjadi di pesantren dan lembaga lainnya. Seperti yang disampaikan dalam wawancara:

Kalau dilihat dari bertambahnya murid atau santri di madrasah atau pondok, berarti masyarakat percaya kepada lembaga yang ada di Bata-Bata. Masyarakat sekarang di Madura khususnya Pamekasan mulai sadar bahwa ijazah itu penting selain mencari ilmu pengetahuan. Dengan adanya penambahan secara pesat murid di madrasah di Bata-Bata, orang tua murid berarti sudah percaya, bukan hanya disini akan tetapi juga di lembaga lain.⁶⁹

Ruslan berpendapat sama seperti yang disampaikan oleh Ahmad Masykur. Ruslan mengatakan bahwa tidak terdapat problem yang bersinggungan dengan politik praktis di lingkungan pesantren, karena

⁶⁸ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

⁶⁹ Ahmad Masykur, *Wawancara*, Pamekasan, 6 September 2012.

memang santri tidak ikut andil dalam politik praktis. Problem yang ada di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata adalah problem klasik yang juga dihadapi oleh pesantren-pesantren lainnya yaitu tentang penanganan pendidikan, dan problem internal semacam ini dampaknya terhadap pesantren tidaklah terlalu signifikan karena terbukti dengan terus bertambahnya santri setiap tahunnya yang masuk kepesantren.⁷⁰

Dari gambaran di atas ditemukan bahwa problem resistensi masyarakat ini muncul akibat dari pengasuh pesantren yang berperan dalam politik. Resistensi mengakibatkan terjadinya *image* negatif masyarakat terhadap pesantren dan kiai sebagai pimpinannya. Hal ini sangat tidak baik terhadap perkembangan pesantren kedepan. Kiai sebagai figur sentral di pesantren sudah ternodai oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat, kalau misalnya hal ini terus dibiarkan, maka ketokohan kiai akan memudar dan bahkan bisa hilang, sehingga nantinya akan menimbulkan rasa keengganan dari masyarakat untuk memondokkan putra-putri mereka ke pesantren.

⁷⁰ Ach. Ruslan Dimiyathi, *Wawancara*, Pamekasan, 27 September 2012.